

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan YME, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor Tahun 2014 –2019. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Laporan Kinerja Nomor 4614), dengan Negara Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor.

Bogor, Januari 2020

Kepala

ttd

Drs. HANAFI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670712 198801 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Bappeda Kota Bogor	1
B. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bogor.....	4
C. Isu Strategis	4
D. Dasar Hukum	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1. PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. VISI DAN MISI.....	8
B. TUJUAN DAN SASARAN	10
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	11
D. POGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM	12
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	15
BAB III.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. PENGUKURAN KINERJA	18
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	22
Sasaran 1 : Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	22
Sasaran 2: Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	23
Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	25
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	26
AKUNTABILITAS KEUANGAN	27
BAB IV.....	30
P E N U T U P	30
IKHTISAR EKSEKUTIF	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019	10
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019	11
Tabel 3 Program dan Indikator Bappeda Kota Bogor Tahun 2019	15
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2019	17
Tabel 5 Predikat Nilai Capaian Kinerja	18
Tabel 6 Target Capaian dan Realisasi Tujuan Bappeda Tahun 2015-2019	19
Tabel 7 Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2019	20
Tabel 8 Target Capaian dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2019	22
Tabel 9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	23
Tabel 10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	24
Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3	26
Tabel 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4	27
Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Kegiatan	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Bappeda Kota Bogor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kewenangan dalam Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan dan Penelitian pengembangan pembangunan. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sinergitas dan berkelanjutan, Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

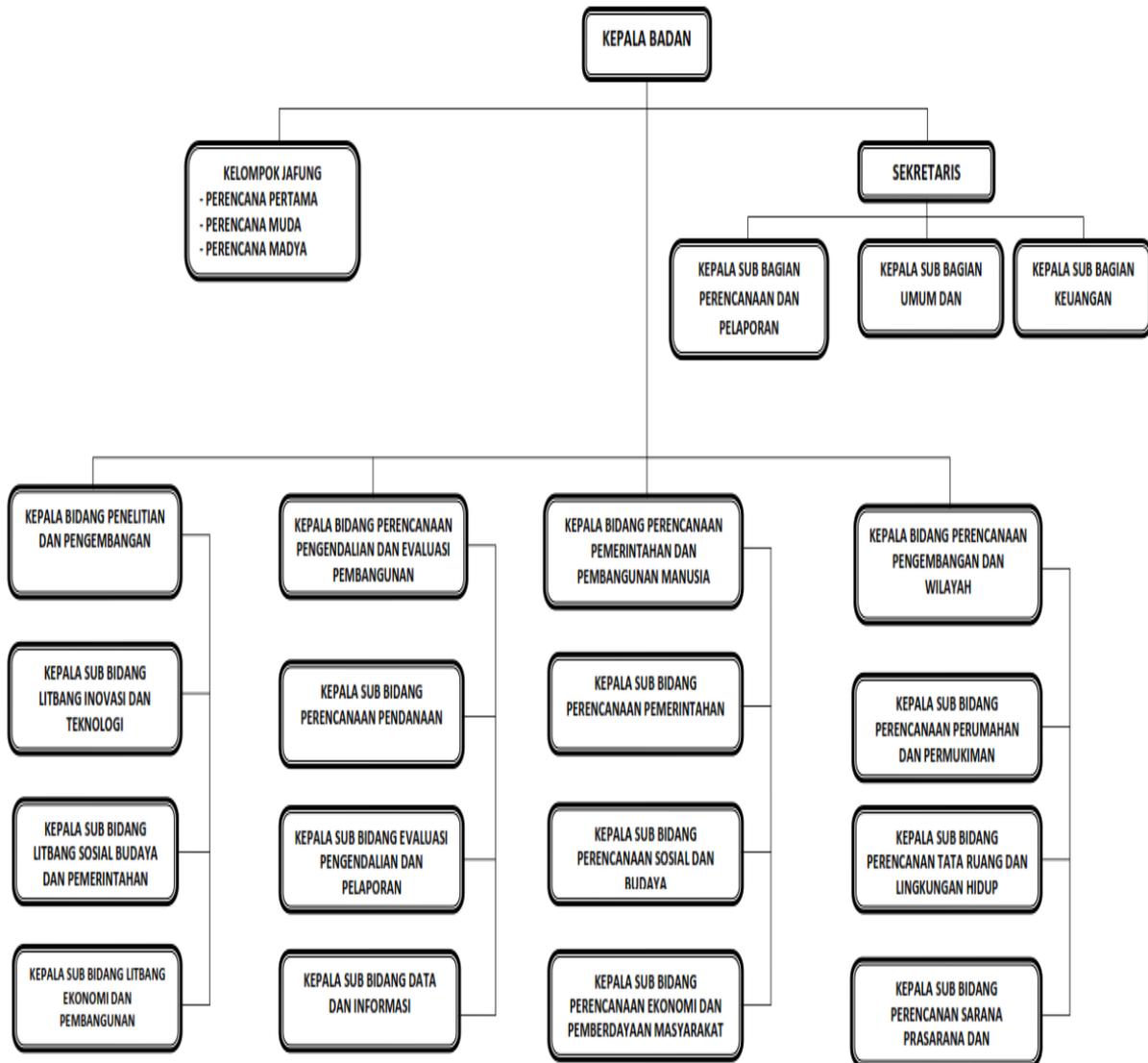
Mengingat nilai strategis yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor secara normatif di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah “Lokomotif Pembangunan” daerah serta menjadi lini terdepan dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor. Oleh karena itu perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada proses dan hasil agar dapat memenuhi kepentingan publik, penyusunannya dilakukan secara partisipatif, professional dan bertanggungjawab sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Agar pelaksanaan pembangunan sejalan dengan orientasi yang diinginkan dan bersifat partisipatif terhadap perkembangan kompleksitas permasalahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah harus menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan asas rencana pembangunan daerah tersebut, maka penyusunan rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor selalu menyerap informasi dari hasil evaluasi kinerja perencanaan sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pendanaan
 - 2) Sub Bidang Data Dan Informasi
 - 3) Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
3. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya
4. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor



Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor

Sumber : Peraturan Walikota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor



B. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bogor

1. Tugas Bappeda Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
5. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

C. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya :

- 1) Perencanaan pembangunan partisipatif, permasalahannya perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat masih belum optimal.
- 2) Perencanaan pembangunan yang holistik, terintegrasi dan mengarah pada konektifitas secara spesial serta berkelanjutan, permasalahannya



- a). Pembangunan daerah masih bersifat persial dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor.
 - b). Pembangunan daerah masih belum berkesinambungan.
- 3) Perencanaan pembangunan berbasis kinerja, permasalahannya pembangunan daerah masih belum seluruhnya berorientasi pada hasil output.

D. Dasar Hukum

LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang; Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Bogor;



9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 78 Tahun 2015 tentang Capaian Sasaran Kinerja Tahunan dalam Lampiran VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019.
10. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor;
11. SK Walikota Nomor: 050.45/304/2017 tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor.

E. Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut merupakan sistematika penulisan LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- a. Gambaran umum Bappeda Kota Bogor
- b. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bogor
- c. Isu Strategis
- d. Dasar Hukum, serta
- e. Sistematika Penulisan.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Perjanjian Kinerja



Bab III AKUNTABILITAS KINERJA:

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- a. Pengukuran Kinerja
- b. Evaluasi, dan Capaian Kinerja
- c. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan didepan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

VISI merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah :



“ Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan secara partisipatif, profesional, dan bertanggungjawab ”

Dalam kaitannya Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan yang berkelanjutan secara partisipatif, profesional dan bertanggungjawab harus memenuhi beberapa syarat yaitu, Perencanaan Pembangunan yang **Berkelanjutan** artinya perencanaan pembangunan harus memihak kepada kelestarian dan keseimbangan lingkungan, peningkatan perekonomian masyarakat serta keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik termasuk keberpihakan pada kesetaraan gender. **Partisipatif** : pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat **Profesional** : semua input SDM Aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan **Bertanggungjawab** : proses perencanaan pembangunan harus terukur baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga memudahkan dalam pengendalian.

MISI adalah penjabaran dari visi organisasi yang dituangkan dalam pernyataan (*statement*) organisasi yang terfokus kepada kebutuhan stakeholdernya. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mempunyai **misi** sebagai berikut:

1. **Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan**
2. **Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif.**
3. **Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.**

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bogor Tahun 2015-2019 sebanyak 4 sasaran strategis. Berikut merupakan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran

Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019

Tujuan	Indikator tujuan	Target indikator tujuan
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Prosentase Keselarasan antara Program Pembangunan daerah dan RPJMD (jumlah indikator kinerja program pembangunan daerah yang menunjang sasaran RPJMD dibagi Jumlah seluruh indikator kinerja program pembangunan daerah X 100%)	100%
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perencanaan pembangunan daerah	3,4
Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja	Nilai AKIP BAPPEDA	A

Tabel 1 Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019

Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran
Meningkatnya sinergitas dan berkelanjutan perencanaan pembangunan daerah	Prosentase keselarasan antara renstra/renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD	100%
	Persentase keselarasan antara perencanaan sektoral (master plan/rencana induk/ rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD	97%
Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	97%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	80%
	Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	60%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Penilaian AKIP BAPPEDA	A
	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat propinsi, dan atau inspektorat kota	100%

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi Internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bogor secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Strategi yang ditetapkan Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang berbasis bukti dan data secara kualitas dan kuantitas yang sinergis dan berkelanjutan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi. Untuk 2015-2019. Kebijakan yang ditetapkan adalah Teraplikasinya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

Program dan Indikator Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	Pengelolaan rumah tangga OPD	2.957.319.100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan inventaris kantor	648.000.000
			Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	891.250.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	25.127.000
		jumlah temuan atas rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan pemeriksaan X 100%		
4	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP	Kegiatan Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor	110.450.000
		Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR		
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun 2019 - 2024	481.156.200
		Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Kegiatan Perencanaan Umum	279.600.000

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Anggaran
		Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan	544.700.000
		Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang		
		Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)	Kegiatan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	82.290.000
6	Program Pengendalian Pembangunan		Upgrading Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota	187.300.000
7	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan	129.300.000
			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya	36.000.000
			Penguatan Lembaga TKPK (Bankeu Jabar 2019)	100.000.000
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Perumahan Permukiman	185.400.000
			Kegiatan Review Masterplan Transportasi	536.800.000
			Kegiatan Perencanaan	489.000

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Anggaran
			Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM	
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD	Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang	907.255.000
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	275.955.600
			Kegiatan Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor	161.950.000
11	Program Penelitian Pengembangan	Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir	Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tahun 2019	236.250.000
		Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota		
		Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat		

Tabel 3 Program dan Indikator Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV. Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan

pembangunan Daerah Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris dan Kepala Bidang oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	-	Persentase Keselarasan antara Renstra /Renja Bappeda dengan RPJMD/RKPD	Persen	100
		-	Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD	Persen	97
2	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	-	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen	97
		-	Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen	97
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	-	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	Persen	80
		-	Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	Persen	30



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	-	Nilai AKIP Bappeda	Nilai	A
		-	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK , Inspektorat propinsi dan atau inspektorat kota	Persen	100

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Capaian (%)	Kategori	Realisasi	Keterangan
85 - 100	Sangat Baik	> Target	Tercapai dan Melebihi Target
70 - <85	Baik	= Target	Tercapai
55 - <70	Cukup	< Target	Tidak Mencapai Target
<55	Kurang	> Target	

Tabel 5 Predikat Nilai Capaian Kinerja

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran pada Bappeda adalah sebagai berikut :

Target Capaian dan Realisasi Tujuan Bappeda Tahun 2015-2019

Tujuan	Indikator tujuan	Target indikator tujuan	Capaian indikator tujuan
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Prosentase Keselarasan antara Program Pembangunan daerah dan RPJMD (jumlah indikator kinerja program pembangunan daerah yang menunjang sasaran RPJMD dibagi Jumlah seluruh indikator kinerja program pembangunan daerah X 100%)	100%	100%
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perencanaan pembangunan daerah	3,4	3,4***
Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja	Nilai AKIP BAPPEDA	A	BB

Tabel 6 Target Capaian dan Realisasi Tujuan Bappeda Tahun 2015-2019

Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	- Persentase Keselarasan antara Renstra /Renja Bappeda dengan RPJMD/RKPD	100%	77,78%
		- Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral	97%	94,22%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019
1	2	3	4	5
		(masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD		
2	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	- Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	97%	61,11%
		- Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	97%	71,15%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	- Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	80%	86%
		- Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	30%	30,43%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	- Nilai AKIP Bappeda	A	BB
		- Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat propinsi dan atau inspektorat kota	100	100

Tabel 7 Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Realisasi pada akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa 4 (empat) Indikator kinerja sesuai yang ditargetkan dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang belum tercapai.

Target Capaian dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target thn 2019	Capaian thn 2019	%	Capaian thn 2018	Kenai kan/ penu ru nan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	- Persentase Keselarasan antara Renstra /Renja Bappeda dengan RPJMD/RKPD	100%	77,78%	77,78	67,43	10,35
		- Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD	97%	95,33%	98,28	95	0,33
2	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	- Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	97%	61,11%	63	66,67	-5,56
		- Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	97%	71,15%	73,35	95	-23,58
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat	- Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam	80%	86%	107,5	74,49	11,51

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target thn 2019	Capaian thn 2019	%	Capaian thn 2018	Kenai kan/ penu ru nan
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam perencanaan pembangunan daerah	APBD					
		- Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	30%	30,43%	101,43	100	-69,57
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	- Nilai AKIP Bappeda	A	BB		-	
		- Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,Inspektorat propinsi dan atau inspektorat kota	100	100	100	100	0

Tabel 8 Target Capaian dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2019

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran 1 meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah merupakan sasaran penting dengan indikator (Persentase Keselarasan antara Renstra/Renja PD dengan RPJMD/RKPD dan Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD. Indikator

tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama yang pelaksanaan setiap tahapan proses harus mempertajam indikator kinerja Perangkat Daerah, Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada pemerintah Kota Bogor. Koordinasi dan kolaborasi antar perencanaan sektor (master plan) rencana induk/rencana aksi dengan RPJMD/RKPD, sehingga ada sinkronisasi perencanaan yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah dengan pusat, Indikator sasaran tersebut diatas merupakan indikator yang sangat penting, relevan, dan cukup untuk mengukur terhadap sasaran 1.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2019	Capaian thn 2019	%	Capaian thn 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	1 . Persentase Keselarasan antara Renstra /Renja Bappeda dengan RPJMD/RKPD	100%	77,78%	77,78	67,43
		2 . Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD	97%	95,33%	98,28	95

Tabel 9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran 2: Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah

Sasaran ke 2 Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan indikator (Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target dan Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target). Indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator sasaran RPJMD secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap realisasi capaian kinerja pembangunan daerah terdapat peningkatan dari 104 indikator kinerja program prioritas dalam RPJMD yang mencapai target hanya 74 indikator program prioritas. Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD target kinerja sasaran dan program telah tertuang dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Indikator sasaran tersebut diatas merupakan indikator yang sangat penting, relevan, dan cukup untuk mengukur terhadap sasaran 2

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2019	Capaian tahun 2019	%	Capaian tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	- Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	97%	61,11%	63	66,67
		- Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	97%	71,15%	73,35	95

Tabel 10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Sasaran ke 3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan indikator (Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD dan Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota). Maka aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang wajib diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor. Musrenbang merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan sesuai dengan tingkatannya. Tujuan diadakannya Musrenbang yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Bogor, maka aspirasi masyarakat yang diakomodir pada tahap perencanaan pembangunan dihitung menggunakan indikator Tingkat aspirasi (usulan) masyarakat yang terakomodir dalam dokumen penganggaran, adapun capaian persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD sebesar 80% yang diakomodir di kegiatan kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah.

Capaian inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang Visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 sebanyak 15 inovasi dari total 46 inovasi yang terinventarisir. Inventarisir inovasi masyarakat didapatkan dari hasil Lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor (dari Kegiatan Penguatan SIDA Tahun Anggaran 2019) sebanyak 37 inovasi dan Kompetisi Inovasi Penanggulangan Kemiskinan (Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dari Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2019) sebanyak 9 inovasi. Secara umum untuk setiap inovasi yang diimplementasikan dapat menunjang satu atau lebih misi, untuk misi 1 yaitu Menjadikan Bogor Kota yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 12 inovasi, misi 2 Menjadikan Bogor Sebagai Kota yang Sehat dan Makmur sebanyak 7 inovasi, misi 3 Menjadikan Bogor Sebagai Kota yang

Berwawasan Lingkungan sebanyak 6 inovasi, dan misi 4 Menjadikan Bogor sebagai Kota Jasa yang Berorientasi pada Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2 inovasi .

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target thn 2019	Capaian thn 2019	%	Capaian thn 2018
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	- Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	80%	86%	107,5	74,49
		- Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	30%	30,43%	101,43	100

Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran 4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. pelaksanaan evaluasi kinerja berpedoman pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) komponen penilaian diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target thn 2019	Capaian thn 2019	%	Capaian thn 2018
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	- Nilai AKIP Bappeda	A	BB		B
		- Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,Inspektorat propinsi dan atau inspektorat kota	100	100	100	100

*Tabel 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4***AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Bogor dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Pagu belanja langsung Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 adalah sebesar Rp.18.505.971.540.- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) realisasi sebesar Rp . Rp.16.646.907.028.- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus TujuhRibu Dua Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 89.95 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Bappeda Kota Bogor pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Anggaran dan Realisasi Kegiatan
Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2019**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Belanja Tidak Langsung	9.729.379.640	8.800.452.954	90,45%
2	Sosialisasi Tata Ruang	907.255.000	873.558.650	96,29%
3	Optimalisasi TJSLP/CSR Perusahaan di Kota Bogor	110.450.000	108.810.000	98,52%
4	Upgrading Sistem Informasi Sarana dan Prasarana	187.300.000	175.285.100	93,59%
5	Pengelolaan Rumah Tangga PD	2.957.319.100	2.598.361.361	87,86%
6	Pengadaan Inventaris Kantor	648.000.000	544.485.420	84,03%
7	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	891.250.000	854.333.517	95,86%
8	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	25.127.000	23.861.600	94,96%
9	Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	82.290.000	79.200.000	96,24%
10	Penyusunan RPJMD 2019-2024	481.156.200	469.300.000	97,54%
11	Perencanaan Umum	279.600.000	224.091.000	80,15%
12	Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan	544.700.000	514.415.100	94,44%
13	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	275.955.600	240.385.600	87,11%
14	Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor	161.950.000	7.996.200	4,94%
15	Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan	129.300.000	108.563.200	83,96%



NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	%
1	2	3	4	5
16	Penguatan Lembaga TKPK (BANKEU JABAR)	100.000.000	89.505.526	89,51%
17	Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya	36.000.000	18.739.800	52,06%
18	Penyelenggaraan Perencanaan Perumahan dan Permukiman	185.400.000	179.697.000	96,92%
19	Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor	489.000	-	0,00%
20	Review Masterplan Transportasi	536.800.000	502.825.000	93,67%
21	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019	236.250.000	233.040.000	98,64%
JUMLAH		18.505.971.540	16.646.907.028	89,95%

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Kegiatan

Berdasarkan Tabel Anggaran dan Realisasi APBD Bappeda Kota Bogor sampai dengan bulan Desember 2019 bahwa capaian seluruhnya adalah 89.95% termasuk ke dalam kategori BAIK atau dana yang dianggarkan terserap sesuai dengan target.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor bulan Januari 2019 sampai dengan Desember Tahun 2019. LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut, secara umum telah tercapai sesuai target dan tercapai melebihi target Dalam Tahun Anggaran 2019, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.18.505.971.540.- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) realisasi sebesar Rp. Rp.16.646.907.028.- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 89.95 %

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan PD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra-PD dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 disusun melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Bappeda Kota Bogor. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan kritikal point yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan PD yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor pada periode Januari sampai dengan

Desember Tahun 2019. Bappeda menggunakan indikator kinerja hasil Reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor memiliki 4 sasaran dan 8 indikator yang ditetapkan yaitu:

SASARAN :

1. Meningkatnya sinergitas dan keberkelanjutan perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR :

1. Prosentase keselarasan antara renstra/renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD.
2. Persentase keselarasan antara perencanaan sektor (masterplan/ rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD.
3. Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target.
4. Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target.
5. Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD.
6. Persentase inovasi masyarakat diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota.
7. Penilaian AKIP Bappeda.
8. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi, dan atau Inspektorat Kota.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan Sumber Daya Manusia , maka sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2019 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2019 Dalam dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sasaran-sasaran strategis untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2019, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Selain beberapa capaian indikator kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :

- Belum optimalnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya tingkat aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- Belum optimalnya tingkat pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi;
- Persentase jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya setelah mengikuti diklat belum maksimal;
- Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dilakukan, diantaranya adalah :

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan dan kajian sektoral kepada PD (*need assessment*);
- Mendorong kebijakan yang berpihak pada berkembangnya jabatan fungsional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta memfasilitasi pejabat fungsional yang telah ada untuk mendapatkan kredit bagi peningkatan kinerja dalam jabatannya;
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan;
- Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan; dan
- Mengoptimalkan aplikasi SIMRAL pada seluruh PD pada lingkungan Pemerintah Kota Bogor.